

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni: Aturan PPKM Harus Kedepankan Humanisme

Tony Rosyid - INDONESIASATU.CO.ID

Jul 19, 2021 - 20:07



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

JAKARTA - Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan jasmani masyarakat, lebih dari itu masyarakat dihadapkan dengan masalah finansial. Tak sedikit masyarakat yang kelaparan karena tak ada penghasilan. Kebijakan PPKM Darurat, di satu harus ditaati, tapi di sini lain penegakan aturan ini harus bijaksana dengan mengedepankan maslahat dan yang paling penting aparat

harus bersikap humanis pada rakyat.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau, jika memang harus dilakukan penertiban hendaknya utamakan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. "Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan," tegas Sahroni dalam rilis yang diterima Parlemen, baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan pendekatan humanis ini penting dalam memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena pandemi Covid-19.

"Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya," katanya.

Sahroni menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.

"Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula," pungkasnya.

Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu yang diduga hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. "Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini," keluh Sahroni. (eko/es)